

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bawono, Icuk Rangga. Setyadi, Erwin. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indonesia.
- Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BFFE.
- Moenir, AS. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, Erwan Agus. Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020. *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- _____. 2021. *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rahayu, Derita Prapti. Sulaiman. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sinamo, Nomensen. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Verawati, Tuti A. 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*

Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Makassar: Universitas 45

Makassar.

Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.

Wijaya, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wursanto, IG. 1988. *Dasar-Dasar Manajemen Personalialia (Personnel Management)*.

Jakarta: Pustaka Dian.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

C. Sumber Internet

<https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> diakses tanggal 5 Juni 2021

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa> diakses tanggal 8 Juni 2021

<https://raharja.ac.id/2020/11/02/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> diakses tanggal 26 Mei 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf> diakses tanggal 28 Agustus 2021

<http://repository.uib.ac.id/1453/5/s-1551121-chapter2.pdf> diakses tanggal 28 Agustus 2021

<https://www.seputarpengertian.co.id/2021/07/mekanisme-adalah.html> diakses tanggal 5 September 2021

D. Jurnal

Sugiman, “Pemerintahan Desa”. Jurnal Binamulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Vol. 7 No. 1 (2018). 82 – 95.

Jefri S. Pakaya, “Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing of Authority to Village In The Context of Regional Autonomy*)”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 1 (2016). 73 – 84.

Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat". Jurnal
Hukum Vol 17 No. 1 (1987). 57-63.